

L K P J

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

BUPATI KETAPANG

TAHUN 2023



PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkah dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang Tahun 2023. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang Tahun 2023 mencakup hasil penyelenggaraan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan Kepala Daerah, tindak lanjut rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan. Selain itu, LKPJ Bupati Tahun 2023 ini memuat pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, dimana dalam penyusunannya menyajikan beragam informasi sebagaimana yang di amanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan informasi dan menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023.

Saya selaku Kepala Daerah Kabupaten Ketapang bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, menyadari akan segala keterbatasan kemampuan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan dan kewenangan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dibahas secara internal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, kami sangat mengharapkan kritik dan saran berupa rekomendasi yang nantinya akan kami jadikan masukan dan perbaikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkah-Nya dan perlindungan-Nya bagi kita semua sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk tetap kuat dan kompak dalam mewujudkan Kabupaten Ketapang Yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera. Amin.

Ketapang, 18 Maret 2024

Bupati Ketapang Prov Kalbar,



MARTIN RANTAN